

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Temuan Studi**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat, diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Angka Indeks Williamson untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 adalah 0,61. Angka Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tidak terlalu fluktuatif pada 7 tahun terakhir dari tahun 2007-2013, angka indeks Williamson tersebut berturut-turut dari tahun 2007-2013 adalah 0,68, 0,68, 0,69, 0,62, 0,62, 0,61, 0,61.
2. Aspek sosial terdiri dari 18 indikator variabel dengan nilai KMO pada analisis faktor adalah 0,759 yang kemudian mengelompok menjadi tiga kelompok yang masing-masing memiliki nilai eigenvalue 7.651, 5.216 dan 1.549.
3. Aspek ekonomi terdiri dari 18 indikator variabel dengan nilai KMO pada analisis faktor adalah 0,744 yang kemudian mengelompok menjadi tiga kelompok yang masing-masing memiliki nilai eigenvalue 8.185, 5.642, dan 1.408.
4. Aspek fisik terdiri dari 8 indikator variabel dengan nilai KMO pada analisis faktor adalah 0,598 yang kemudian mengelompok menjadi tiga kelompok yang masing-masing memiliki nilai eigenvalue 2.760, 1.337, dan 1.140.
5. Berdasarkan hasil analisis *interregional comparison: standardized variable* pada aspek sosial, pada kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Karawang dengan nilai 0.36126625, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kota Banjar dengan nilai -0.55233375. Pada kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Bogor dengan nilai 2.8553560, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kota Banjar dengan nilai -1.3893700. Pada kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 1.8071800, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Sumedang dengan nilai -0.6336180.
6. Berdasarkan hasil analisis *interregional comparison: standardized variable* pada aspek ekonomi, pada kelompok ketenagakerjaan, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Bogor dengan nilai 2.81124714, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kota

Banjar dengan nilai -1.25522571. Pada kelompok produktifitas ekonomi dan tenaga kerja, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 0.669147, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kota Cimahi dengan nilai -0.549877. Pada kelompok performa ekonomi dan investasi wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Bandung dengan nilai 2.6785380, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Kota Banjar dengan nilai -0.7308140.

7. Berdasarkan hasil analisis *interregional comparison: standardized variable* pada aspek fisik, pada kelompok tataguna lahan dan panjang jalan aspal, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Sukabumi dengan nilai 0.9694960, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Bandung Barat dengan nilai -0.8366980. Pada kelompok kondisi jalan dan suhu, wilayah yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Cirebon dengan nilai 1.5044450, sedangkan wilayah dengan nilai terendah adalah Bandung Barat dengan nilai -1.6132900.
8. Berdasarkan hasil analisis kluster yang inputnya merupakan hasil analisis *interregional comparison: standardized variable*, terbentuk 7 kluster wilayah di Provinsi Jawa Barat.

## 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta temuan studi dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat

Tingkat ketimpangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 termasuk kedalam kategori wilayah yang memiliki ketimpangan level tinggi dengan angka Indeks Williamson 0,6. Selama tahun 2007 sampai 2013 indeks ketimpangan di Provinsi Jawa Barat tidak terlalu fluktuatif selalu berada pada angka 0.6 yang berarti pula selalu berada dalam ketimpangan level tinggi.

2. Kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dianalisis menggunakan *interregional comparison: standardized variable* dengan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi dan fisik. Ketiga aspek tersebut kemudian dijadikan 9 kelompok agar dapat terlihat lebih jelas kondisi ketimpangan antar wilayah, kelompok-kelompok tersebut yaitu: kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan, kelompok ketenagakerjaan, kelompok produktifitas ekonomi dan tenaga kerja, kelompok performa ekonomi dan investasi, kelompok tataguna lahan dan panjang jalan aspal, kelompok kondisi jalan dan suhu, dan

kelompok curah hujan. Setiap kelompok menunjukkan kondisi ketimpangan yang berbeda-beda, wilayah yang memiliki nilai buruk pada satu kelompok belum tentu mendapatkan nilai buruk di kelompok-kelompok lainnya, contohnya pada kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan, terdapat 11 wilayah yang tergolong memiliki nilai yang rendah pada aspek tersebut, sedikit lebih banyak dibandingkan pada kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, sedangkan pada kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan hanya terdapat 6 wilayah yang tergolong memiliki nilai rendah. Oleh karena itu sangat penting untuk menilai ketimpangan antar wilayah ini dari beberapa aspek, sehingga dapat diketahui kelemahan dan keunggulan wilayah tersebut.

### 3. Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat

Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2 yang secara berurutan karakteristiknya semakin baik. Semua tipe low memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu buruk di semua sektor, sedangkan tipe medium memiliki karakteristik yang sedang-sedang saja pada hampir semua sektor dan masih bisa ditingkatkan, dan tipe high memiliki karakteristik sangat baik di semua sektor. Berdasarkan tipologi ini dapat diketahui bahwa 19 wilayah atau 73% kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk tipe low atau rendah.

Pada tipe low-1, wilayah yang memiliki kondisi paling membutuhkan perhatian adalah Kota Tasikmalaya dan Ciamis, dan sektor yang paling penting untuk diatasi pada tipe low-1 adalah penyerapan tenaga kerja. Pada tipe low-2, wilayah yang memiliki kondisi paling membutuhkan perhatian adalah Sumedang, serta angka kemiskinan yang sangat tinggi harus diberikan perhatian dan penanganan. Pada tipe low-3, wilayah yang paling membutuhkan perhatian pada tipe ini adalah Garut, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah pada tipe low-3 harus meningkatkan produktifitas perekonomiannya serta harus mengenali sektor-sektor potensial yang dimiliki, kemudian mengembangkan sektor potensial tersebut sehingga produktifitas perekonomiannya dapat menjadi lebih baik. Wilayah-wilayah yang terdapat dalam tipe medium dan tipe high memiliki karakteristik yang sama sehingga perhatian dan penanganan yang diberikanpun sama.

### 4. Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa faktor yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, faktor tersebut yaitu: Perbedaan kualitas sumberdaya manusia, Perbedaan angka pengangguran, Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, Perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, Perbedaan kualitas infrastruktur, Perbedaan jumlah investasi, Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor tersebut sama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di

Provinsi Jawa Barat. Wilayah-wilayah yang harus mendapatkan perhatian dalam memperbaiki faktor-faktor tersebut adalah wilayah-wilayah yang terdapat dalam tipe low, karena wilayah-wilayah yang terdapat dalam tipe low rata-rata memiliki kondisi yang buruk pada kualitas sumberdaya manusia, angka pengangguran, taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, fasilitas pendidikan serta kesehatan, kualitas infrastruktur, jumlah investasi, pendapatan asli daerah (PAD).

#### 5. Strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat

Strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa barat dibagi berdasarkan tipe wilayah, meskipun demikian setiap kabupaten/kota tetap memiliki strategi masing-masing sesuai dengan kondisi wilayahnya. Strategi untuk wilayah tipe low adalah meningkatkan kualitas infrastruktur seperti peningkatan kelas jalan dan tentu saja memperbaiki jalan yang telah rusak, meningkatkan jumlah investasi dengan beberapa cara antara lain meningkatkan daya tarik wilayah dan mempromosikan wilayah kepada pihak investor juga dapat meningkatkan jumlah investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah dengan beberapa cara antara lain meningkatkan kapasitas BUMD, mendorong sektor basis untuk berkembang, menekan pengeluaran dalam bentuk impor barang, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan cara mempermudah warga kurang mampu untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik, mengurangi angka pengangguran dengan beberapa cara antara lain membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penyaluran tenaga kerja, mendorong masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan beberapa cara antara lain meningkatkan taraf pendidikan penduduk serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dengan beberapa cara antara lain meningkatkan UMR, memberikan pelatihan-pelatihan dan bahkan modal bagi masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.

Tipe medium membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan dengan tipe low, karena kondisi pada kedua tipe ini berbeda. Beberapa strategi untuk tipe medium yaitu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sedangkan strategi untuk tipe high yaitu menjaga stabilitas wilayah supaya tidak terjadi kemunduran dalam performanya. Strategi-strategi tersebut dapat menjadikan performa wilayah semakin baik dalam sektor yang sebelumnya buruk, dengan demikian tidak terjadi ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antar kabupaten/kota dalam sektor-sektor tersebut dan ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dapat berkurang dan pemerataan semakin tinggi.

### 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan hasil studi dan kesimpulan di atas, selain strategi dapat pula diusulkan beberapa rekomendasi bagi beberapa pihak:

a. Rekomendasi Bagi Pemerintah

- Pemerintah harus bisa mengenali potensi dan kelemahan wilayah masing-masing. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang apabila dikenali dan secara kreatif dikembangkan, akan menjadi nilai tambah bagi wilayah tersebut. Contohnya seperti wilayah yang memiliki sektor basis pertanian, apabila pemerintah tidak mengenali potensi ini maka pertanian akan dibiarkan menjadi pertanian konvensional, namun apabila pemerintah cermat dalam mengenali potensi wilayah, pertanian ini dapat dijadikan agroindustri maupun agrowisata yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan lebih.
- Pemerintah mencari peluang untuk mengembangkan potensi wilayah dan bisa bersaing dengan wilayah lainnya. Terkadang potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah juga dimiliki oleh wilayah lain sehingga timbul persaingan. Oleh karena itu, pemerintah harus pintar dalam mencari peluang, salah satu contohnya adalah kelebihan produksi pertanian, hal ini menjadi suatu potensi karena dengan mengekspor, wilayah bisa mendapatkan pendapatan lebih baik, namun persaingan dalam mengekspor pun tidak sedikit, maka pemerintah harus mencari cara agar dapat bersaing seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kecepatan pengiriman barang, dan lain-lain.
- Menjalin kerjasama antar wilayah agar dapat saling melengkapi. Kerjasama antar wilayah tentu sangat dibutuhkan, kerjasama yang dapat terjadi seperti ekspor impor, pertukaran pelajar dan lain sebagainya.
- Untuk mengatasi ketimpangan wilayah pemerintah harus menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Untuk tipe wilayah low, banyak hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan jumlah investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan.
- Untuk tipe wilayah medium beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat

- Untuk tipe high yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga kestabilan wilayahnya, karena tipe ini sudah memiliki kondisi yang baik.
- b. Rekomendasi Bagi Pihak Swasta
- Pihak swasta dapat berinvestasi dengan bentuk penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal di wilayah tersebut
  - Pihak swasta dapat memanfaatkan bahan atau potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat mengurangi ongkos produksi bagi pihak swasta dan wilayah pun mendapatkan keuntungan karena potensinya wilayahnya dapat dimanfaatkan
  - Pihak swasta memberi bekal kepada masyarakat lokal dan pemerintah agar kelak pemerintah beserta masyarakat lokal dapat mengelola potensi tersebut dengan mandiri
  - Pemberian CSR harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan wilayah atau masyarakat di wilayah tersebut
- c. Rekomendasi Bagi Masyarakat
- Peningkatan pendidikan masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak
  - Masyarakat ikut serta berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, agar keterampilan masyarakat bisa meningkat
  - Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat tersebut, seperti kegiatan berwirausaha.
- d. Rekomendasi Bagi Penelitian Lanjut
- Melakukan penelitian mengenai tingkat ketimpangan intra wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang ketimpangan didalamnya yang lebih buruk
  - Melakukan penelitian untuk mengetahui variabel dan indikator mana yang paling besar pengaruhnya terhadap ketimpangan dan apakah pengaruhnya positif atau negatif menggunakan analisis seperti analisis regresi.